

MODEL PENGELOLAAN KELAS DI SEKOLAH DASAR INKLUSI KABUPATEN BOJONEGORO

Hisbollah

Pendidikan Luar Biasa, Fakultas II, Universitas Negeri Surabaya
hisbollah.19002@mhs.unesa.ac.id

Budiyanto

Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
budiyanto@unesa.ac.id

Mudjito

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
mudjitomudjito@unesa.ac.id

Abstract

The management of the learning process in inclusive schools is different from regular schools in general. This is because the presence of students with special needs in inclusive schools causes learning in the classroom to be managed specifically. This study aims to describe classroom management for students with special needs, as well as aspects of the support system in managing inclusive classes at SD Muhammadiyah 3 ICP and SD Islam Terpadu Bojonegoro. This study uses a descriptive qualitative self-report research method. The results showed that classroom management in inclusive schools at SD Muhammadiyah 3 ICP and SD Islam Terpadu in the interaction aspect of regular students and special needs all teachers were able to interact in speaking, listening, and non-verbally, while in writing it was not applied. Meanwhile, in terms of setting the physical condition of the class, it is adequate, although in terms of infrastructure there are still many things that need to be improved, especially media for students with special needs, the unavailability of resource rooms, and the unavailability of high and low-stimulus spaces.

Keywords: *classroom management, inclusive schools, primary schools*

Abstrak

Pengelolaan proses pembelajaran di sekolah inklusi berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Hal ini dikarenakan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menyebabkan pembelajaran di dalam kelas harus dikelola secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kelas pada peserta didik berkebutuhan khusus, serta aspek sistem dukungan dalam pengelolaan kelas inklusi di SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif self-report. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan kelas di sekolah inklusi SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada aspek interaksi peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus seluruh guru sudah mampu berinteraksi dalam berbicara, mendengarkan, dan non verbal, sedangkan secara tertulis tidak diterapkan. Sedangkan dalam hal pengaturan kondisi fisik kelas sudah memadai, meskipun dalam hal sarana prasarana masih banyak yang perlu ditingkatkan khususnya media untuk peserta didik berkebutuhan khusus, belum tersedianya ruang sumber, serta belum tersedianya ruang berstimulus tinggi dan rendah.

Kata kunci: *pengelolaan kelas, sekolah inklusif, sekolah dasar*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya penting yang direncanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia agar dapat menjadi pribadi yang mandiri. Pendidikan menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendidik dan mengarahkan anak bangsa menjadi lebih berkualitas. Di Indonesia pendidikan diberikan secara merata bagi semua anak, termasuk juga pada anak berkebutuhan khusus. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi semua anak adalah dengan mengadakan program pendidikan inklusif. Sekolah inklusif menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar dalam setting kelas yang sama dengan siswa lain pada sekolah reguler. Upaya ini dilakukan agar siswa berkebutuhan khusus dapat belajar dan berinteraksi bersama-sama dengan siswa lain seusianya.

Salah satu tujuan pengadaan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan akomodasi pada setiap perbedaan yang dimiliki oleh siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Ilahi (2013), menjelaskan bahwasanya pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang memfasilitasi dan memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar dan berinteraksi dengan siswa seusianya pada sekolah-sekolah terdekat. Dengan adanya sistem pendidikan inklusif harapannya dapat memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya. Adapun Landasan pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Direktorat PKLK diantaranya adalah menyalurkan Banper (bantuan pemerintah) pada Pokja (kelompok kerja) pelaksana pendidikan

inklusif di wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Sebagai tindak lanjut dari penyaluran dana tersebut, Pokja penerima dana wajib melakukan gerakan untuk menggencarkan sistem pendidikan inklusif di masyarakat dan lembaga pemerintahan. Hasil kinerja yang telah dilakukan, hingga saat ini telah tercatat sebanyak 113 kabupaten/kota dan 12 provinsi telah menyatakan diri sebagai kota/kabupaten dan provinsi inklusif.

Pendidikan inklusif berupaya memberikan pelayanan terbaik sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan pada anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Garnida (2015), yang menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan inklusif, sekolah harus siap menerima bagaimanapun kondisi siswa dan dapat memberikan fasilitas serta memenuhi kebutuhan pembelajarannya. Bendová in Skutil, Zikl et al., (2011), dalam konteks mendidik anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus, kita berbicara tentang kelas inklusif yang mewakili lingkungan pendidikan yang terbuka untuk semua tanpa diskriminasi dan prasangka (yaitu untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus serta anak-anak yang kurang beruntung secara sosial, orang asing, dll).

Pendidikan inklusif merupakan sistem yang dibentuk sebagai upaya untuk memberikan hak dasar bagi setiap anak sebagai warga negara berupa pendidikan. Konsep dari pendidikan inklusif pada dasarnya yaitu dilaksanakan secara terbuka dan menerima siswa. Konsep ini menjadi salah satu gagasan implementasi dari pendidikan universal sehingga dapat mewujudkan sekolah yang responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan yang dimiliki oleh siswanya. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menjamin keterlibatan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Terdapat beberapa hal yang menjadi pedoman wajib bagi setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan Permendiknas No.70 tahun 2009. Aturan tersebut berisi tentang beberapa komponen yang harus ada pada sistem pendidikan inklusif diantaranya adalah peserta didik, identifikasi dan asesmen, kurikulum, ketenagaan, kegiatan pembelajaran, sistem kenaikan kelas, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, pembiayaan, penghargaan dan sanksi

serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah adanya sistem pengelolaan kelas. Hal ini dikarenakan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus. Tujuan dibentuknya pengelolaan kelas adalah untuk mempermudah guru dalam melaksanakan dan mengatur pelaksanaan pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien. Sebenarnya pengelolaan kelas pada setting pendidikan inklusif sudah diatur dalam pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2011. Berdasarkan pedoman tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan pembelajaran pada pendidikan inklusif diantaranya terdiri dari pelaksanaan dalam kelas reguler dengan pendampingan GPK (Guru Pendamping Khusus), kelas reguler penuh, dan kelas khusus. Hermanto (2010), menjelaskan bahwa pengelolaan kelas inklusif penting bagi siswa berkebutuhan khusus agar pembelajaran dapat lebih nyaman dan bermakna.

Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah marak di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi kabupaten yang mendukung program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bojonegoro No. 38 tahun 2013. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Bojonegoro tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 1.090 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah pendidikan inklusif dengan jumlah 1.239 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun rincian dari sekolah inklusif tersebut yaitu jenjang TK sebanyak 312 lembaga, SD sebanyak 737 lembaga, SMP sebanyak 84 lembaga dan masing-masing 53 lembaga untuk SMA dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut sudah mempunyai SK sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Kabupaten Bojonegoro, terdapat dua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain, SD Muhammadiyah 3 ICP Kecamatan Sumberrejo,

dan SD Islam Terpadu Bojonegoro. SD Muhammadiyah

3 ICP Kecamatan Sumberrejo sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif semenjak tahun ajaran 2013-2014 yang sudah terhitung selama 7 tahun menerima anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler. Pada saat ini memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, lamban bicara, anak autis dan lamban belajar.

Observasi awal hasil wawancara dengan kepala sekolah di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo pembelajaran di sekolah ini menggunakan kurikulum sekolah reguler umum. Guru yang ada di sekolah tersebut juga beragam yang terdiri dari guru kelas umum yang berlatar belakang pendidikan sekolah umum non PLB, guru pembimbing khusus (GPK), guru pendamping, dan juga guru kunjung yang memiliki keterampilan kerumahtanggaan, keterampilan, dan juga kesenian. Proses pembelajaran yang dilakukan pada sekolah tersebut setiap hari dilakukan secara bersama antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu ruang kelas yang sama. Pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari pada satu ruang kelas yang sama antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu ruang kelas yang sama. Namun bagi beberapa anak yang mengalami lambat belajar diberikan adanya pendampingan dan berbagai optimalisasi kemampuan belajarnya, salah satunya dalam bentuk mengadakan remidi. Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan guru kelas mengalami kesulitan dalam melibatkan siswa berkebutuhan khusus secara aktif dalam pembelajaran. Kesulitan yang ditemui diantaranya pada aspek pemilihan teknis dan metode pengajaran yang sesuai pada setiap siswa berdasarkan dengan kondisinya.

Kemudian yang kedua yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Bojonegoro sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sejak tahun pelajaran 2014/2015. Sesuai dengan hasil observasi awal kami di SD Islam Terpadu. Hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa sebenarnya problematika yang dialami sekolah penyelenggara inklusif hampir sama dengan SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo yaitu tidak ada guru pengajar yang berlatar belakang pendidikan

luar biasa sebagai guru pendamping khusus sehingga pihak sekolah menunjuk guru lulusan PGSD sebagai pengajar anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang bermacam-macam sehingga guru merasa kesulitan dalam pengelolaan kelas saat pembelajaran. Belum lagi pada saat pembelajaran berlangsung siswa reguler juga sering membuly siswa siswi berkebutuhan khusus pada saat pembelajaran berlangsung sehingga proses pembelajaran tidak kondusif dan pembelajaran tidak terlaksana secara optimal. Selain itu kurangnya sarana prasarana penunjang pembelajaran ABK seperti ruang sumber, media-media pembelajaran yang terbatas serta aksesibilitas di sekolah yang belum ada juga sebagai problematika di SD Muhammadiyah 3 dan ICP Sumberrejo.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah saya laksanakan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas pada peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satu masalah utama yang ada adalah adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, sehingga pengelolaan pembelajaran juga harus dilakukan secara berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus lebih disederhanakan agar lebih bermakna dan dapat dipahami dengan baik oleh anak. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap elemen yang ada di sekolah, baik tenaga pendidik maupun kependidikan harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif secara menyeluruh.

Jumlah siswa di kelas reguler berjumlah 40-50 anak. Hal ini tentu menyebabkan masalah dalam pembelajaran apabila tidak dilakukan pengelolaan secara efektif pada pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu diperlukan adanya berbagai penyesuaian terhadap layanan pendidikan dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai keberagaman/kebutuhan khusus siswa. Diantara hal yang harus dilakukan penyesuaian juga yaitu diantaranya pada aspek kurikulum, penataan kelas, sarana prasarana, dan kemampuan interaksi sosial yang antar siswa dalam kelas tersebut. Selain itu,

pemahaman guru terkait kondisi anak berkebutuhan khusus juga merupakan suatu hal yang penting. Hal ini karena pengetahuan guru berhubungan dengan pengelolaan dan pelayanan kelas terhadap anak berkebutuhan khusus secara optimal. Jika semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan kelas inklusif sudah diimplementasikan maka akan tercipta pembelajaran yang berkualitas. Indikator dari kualitas pembelajaran yakni terwujudnya iklim kelas yang efektif, kreatif, aktif, serta menyenangkan bagi semua anak. Selain itu adanya hubungan individu yang sehat sehingga mendorong munculnya perilaku siswa yang diharapkan. Maka dari itu, peran guru dalam melakukan pengelolaan kelas merupakan suatu hal yang penting.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sucuoglu, Bulbin., dkk., menunjukkan bahwa ikatan antara sekolah dan peserta didik terbentuk karena adanya pengelolaan kelas yang baik. Maksud dari hal ini adalah pengelolaan kelas yang dilakukan secara efektif akan berdampak positif pada siswa, baik pada aspek kemampuan akademik, pemahaman, perkembangan emosi, termasuk juga motivasi akademik pada siswa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengamati strategi pengelolaan kelas dari 44 guru dinilai dengan menggunakan Formulir Pengamatan Manajemen Kelas Proaktif. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pengelolaan kelas di sekolah dasar inklusif Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Moleong (2013), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai sumber metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat insuktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menemukan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada penelitian ini berusaha untuk menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Tujuannya supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi ketika di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif pada penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi yang bersifat benar-benarnya, serta memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai model pengelolaan kelas di sekolah dasar inklusi Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Tujuan dilakukannya pengelolaan penelitian adalah untuk mengoptimalkan terwujudnya pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas berhubungan erat dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga dapat meningkatkan disiplin belajar yang sehat, serta menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menguntungkan.

Kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan pengelolaan kelas sesuai dengan pernyataan Santrock (2005), aspek pengelolaan kelas dibagi menjadi empat yang meliputi penerapan pemberian umpan balik kepada siswa berupa penghargaan dan hukuman, menerapkan aturan dan prosedur di dalam kelas, membangun atmosfer belajar yang positif, serta meningkatkan interaksi antara guru dan siswa saat di dalam kelas.

Hasil penelitian menemukan bahwa SD Muhammadiyah 3 ICP telah menerapkan gaya pengelolaan kelas dan pendekatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik dan positif bagi siswa. Pendekatan pengelolaan yang digunakan yaitu merujuk pada gabungan

antara pendekatan kebebasan dan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap perilaku siswa. Pada pendekatan ini guru berperan dalam menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan di dalam kelas. Pada sisi yang lain, pendekatan kebebasan diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu siswa untuk bebas belajar dengan tidak terbatas tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, peran guru sangatlah penting dalam upaya implementasi pendekatan ini secara optimal pada siswa.

Pengelolaan pembelajaran memang suatu unsur penting yang harus dilakukan oleh guru pada setting kelas inklusi. Sama halnya dengan yang diimplementasikan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP, SD Islam Terpadu Bojonegoro juga menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan pengajaran dan pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan Pengajaran adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa pengajaran yang baik mampu mencegah munculnya masalah oleh peserta didik, serta mampu mendeteksi masalah. Fokus utama yang dilakukan pada pendekatan ini adalah melakukan perbaikan dan pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik.

Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran yang baik. Selain menggunakan pendekatan pengajaran SD Islam Terpadu Bojonegoro menggunakan pendekatan perubahan tingkah laku (Behavior Modification) yaitu pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku peserta didik yang baik serta mencegah tingkah laku yang kurang baik. Dari kedua pendekatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran.

Aspek pengelolaan kelas yang kedua yaitu penerapan aturan dan prosedur dalam pembelajaran di kelas. Menurut Muijs dan Reynolds (2008), yaitu Rules (aturan) merupakan suatu hal yang menjelaskan boleh dan tidak boleh dilakukan oleh murid, dan dinyatakan secara tertulis. Sedangkan LouAnne Johnson (2008), menambahkan bahwasanya aturan dan prosedur dalam pembelajaran merupakan suatu upaya yang

dilakukan untuk memberikan petunjuk kepada siswa secara jelas mengenai perilaku murid dan juga memberikan lebih banyak pilihan pada guru.

Upaya pertama yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu pendekatan prosedur dan aturan. Prosedur dan aturan yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yakni dengan cara menyampaikan aturan tersebut secara tertulis. Prosedur dan aturan tersebut dilakukan secara terstruktur dan konsisten sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk mencapai perubahan. Realisasi aturan dan prosedur yang dilakukan yakni dengan menyediakan jadwal harian visual dalam bentuk tabel waktu. Selain menerapkan pendekatan prosedur dan aturan, sekolah tersebut juga menerapkan metode khusus seperti social story untuk menunjang kesuksesan pada proses pembelajaran.

Aspek pengelolaan kelas yang ketiga yaitu interaksi guru dengan siswa. Interaksi merupakan aspek penting karena terkait dengan pengaturan tingkah laku, dinamika kelompok, minat/perhatian, kedisiplinan, dan motivasi siswa dalam belajar. Interaksi sosial seringkali berdampak positif terhadap pengelolaan kelas. Hal ini merupakan hasil positif terbangunnya interaksi sosial antara siswa dengan guru. Interaksi guru dengan siswa terdiri dari beberapa aspek yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menulis, mendengarkan, dan cara berperilaku yang benar bagi anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi suatu masalah.

Salah satu cara yang sudah diterapkan pada SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro berkaitan dengan interaksi guru dengan siswa dalam hal keterampilan berkomunikasi yakni penggunaan bahasa yang sederhana pada anak berkebutuhan khusus. Instruksi yang diberikan oleh guru disederhanakan dan penyampaian kalimat dilakukan secara jelas. Selain itu, guru juga telah menghindari penggunaan kalimat kompleks dan sulit dipahami oleh siswa berkebutuhan khusus, misalnya kalimat sarkasme, kiasan, serta kalimat ambigu dan abstrak. Pilihan kata diberikan disesuaikan dengan kata yang lazim didengar peserta didik dan sesuai konteks. Serta guru memberikan siswa penawaran.

Kemudian pada aspek keterampilan menulis guru menulis pesan/informasi dengan jelas dan dapat terbaca, guru menyiapkan media untuk menyampaikan pesan tertulis, guru memahami pesan tertulis yang disampaikan peserta didik. Pada aspek keterampilan mendengarkan guru menunggu respon siswa paling tidak 10 detik. Sedangkan berkaitan dengan aspek keterampilan non verbal guru menerapkan ekspresi dan komunikasi mata, guru menerapkan sentuhan, guru menggunakan komunikasi diam, guru menggunakan komunikasi diam.

Pada aspek menghadapi perilaku bermasalah guru mengenal pemicu perilaku bermasalah, Guru menerapkan intervensi minor dengan pengalihan perhatian dan melatih kemampuan komunikasi pengganti, Guru menerapkan intervensi moderat dengan bersikap tenang dan mengajak peserta didik ke ruang lain, Guru melibatkan orang tua dan pihak lain dalam pencegahan dan penanganan perilaku bermasalah, serta Guru menghindarkan peserta didik dari bahaya.

Aspek pengelolaan kelas yang keempat yaitu Penerapan Kebijakan Penghargaan dan Hukuman. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Dalam mengelola kelas tidak jarang aturan dan prosedur yang sudah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik yang tidak jarang juga memunculkan perilaku bermasalah pada peserta didik. Mengatasi hal ini penerapan penghargaan dan hukuman dapat menjadi solusi yang efektif. Penerapan kebijakan penghargaan dan hukuman terkait dengan pengaturan tingkah laku, kedisiplinan, gairah belajar, dan dinamika kelompok. Pemberian penghargaan serta hukuman dalam penerapannya akan lebih baik apabila melibatkan peserta didik dalam pembuatan dan penerapannya.

Guru dapat membuat kontrak belajar dengan peserta didik, ataupun menggunakan papan penghargaan dan hukuman yang dapat diamati peserta didik setiap hari. Secara umum pemberian penghargaan dapat berupa pujian, maupun hadiah. Pujian dapat berupa verbal maupun non verbal. Sedangkan hadiah merupakan pemberian berupa benda yang dapat memotivasi peserta didik.

Hal-hal yang sering dilakukan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu

Bojonegoro dalam aspek penerapan kebijakan penghargaan yaitu guru menyediakan penghargaan yang ditunjukkan pada peserta didik tetapi tidak mudah dijangkau peserta didik, penghargaan dapat berupa makanan/minuman, kegiatan, sosial, atau token. Dalam hal penerapan kebijakan hukuman yang digunakan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu Guru memberikan hukuman secara edukatif, dan guru memberikan hukuman pada peserta didik hanya sebatas verbal (ucapan).

Pengaturan Kondisi Fisik Kelas

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas adalah terkait erat dengan segala benda mati yang ada lingkungan kelas. Adapun aspek pengaturan kondisi fisik kelas terbagi atas beberapa aspek yang meliputi keindahan, kenyamanan, sarana dan prasarana, aksesibilitas dan visibilitas. Carolyn & Edmund (2015), menyebutkan terdapat empat kunci bagi guru dalam melakukan pengaturan kelas secara efektif dan efisien. Pertama, berikan kebebasan mobilitas pada siswa; kedua, pastikan semua siswa masuk dalam pantauan guru; ketiga, berikan perlengkapan belajar yang mudah diakses siswa dan tetapkan instrumen belajar; keempat, kondisikan tampilan ruang kelas dan presentasi dapat dengan mudah dijangkau dan terlihat oleh siswa.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang pertama adalah sarana prasarana. Kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan. Sarana dan prasarana di kedua sekolah pendidikan inklusif dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini tidak selaras dengan hasil temuan penelitian Keitaro (2017), bahwa beberapa sekolah inklusif di Jepang tidak memiliki jumlah ruang kelas yang cukup. Jumlah ruang kelas di sekolah kebutuhan khusus belum sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa. Di beberapa sekolah, ruang kelas dibagi dengan partisi menjadi dua kompartemen, yang masing-masing memegang pelajaran yang terpisah. Dalam kasus lain, fasilitas non-kelas dikonversi ke ruang kelas sementara.

Situasi ini dianggap memburuk kualitas pengalaman siswa di sekolah kebutuhan khusus.

Karena kurangnya infrastruktur dan fasilitas dalam bidang pendidikan khusus, pemerintah meminta masing-masing sekolah inklusif untuk membangun fasilitas yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memanfaatkan subsidi untuk membangun konstruksi bangunan tersebut, subsidi diberikan dari sepertiga sampai setengah dari biaya konstruksi. Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah menjadi salah satu penguat adanya kebijakan pendidikan inklusif di Jepang, sedangkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro masih belum ada dukungan penuh, termasuk anggaran khusus untuk pendidikan inklusif. Di Jepang pemerintah memanfaatkan dana subsidi yang mereka dapatkan diperhitungkan untuk alokasi insentif bagi staf onn pengajar yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan pemenuhan fasilitas pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana yang sudah ada di SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu ruang kelas yang sudah memadai berukuran sesuai dengan standart yang telah ditentukan Dinas Pendidikan yaitu minimal berukuran $2m^2$ per peserta didik, kelas memiliki pintu dan pencahayaan memadai, Kelas memiliki kursi dan meja peserta didik yang memadai, kelas memiliki kursi dan meja guru yang memadai, kelas memiliki lemari penyimpanan, kelas memiliki papan panjang ukuran minimal 60cmx120 cm, kelas memiliki papan tulis dengan ukuran minimal 90 cm x 200 cm, kelas memiliki media pendidikan, kelas memiliki tempat sampah, kelas memiliki wastafel/tempat cuci tangan, kelas memiliki jam dinding, kelas memiliki soket listrik, kelas memiliki perlengkapan tulis untuk guru dan peserta didik, kelas memiliki jadwal harian visual, kelas memiliki wadah perlengkapan dan hasil kerja peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah diberi label yang sesuai, serta tersedia media untuk program pengembangan kekhususan.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang kedua adalah visibilitas. Menurut Karwati dan Priansa (2014), visibilitas atau keleluasaan pandang terkait dengan penempatan maupun penataan kelas sehingga tidak mengganggu pandangan peserta. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro menerapkan

pengaturan kondisi fisik kelas dalam aspek visibilitas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: Guru menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di posisi yang mudah dijangkau, guru menata rapi dan menghindarkan bangku peserta didik berkebutuhan khusus dari distraksi, guru menggunakan gaya penataan kelas klaster.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan dalam segala aspek kehidupan. Adanya aksesibilitas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bagi individu dengan hambatan fisik agar dapat melakukan mobilitas tanpa hambatan. Aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik merupakan kemudahan yang diberikan pada anak untuk dapat menjangkau lingkungannya dengan mudah. Contoh dari aksesibilitas fisik yaitu meliputi jalan, area, lahan, dan lingkungan tempat mobilitas anak. Sedangkan aksesibilitas non fisik merupakan akses yang diberikan berkaitan dengan program atau sistem yang bertujuan untuk mempermudah suatu permasalahan dengan bantuan program atau sistem tersebut.

Aksesibilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu masih sangat minim, karena bangunan masih naik turun berupa tanjakan dan tangga, belum ada toilet khusus untuk PDBK, lantai yang belum didesain untuk siswa tunanetra, didalam ruang kelas yang masih belum aksesibilitas karena masih ada tangga untuk naik menuju papan tulis serta masih banyak selokan di depan ruang kelas yang belum didesain untuk keamanan PDBK. Selain itu SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu belum memiliki alat asesmen khusus yang tersedia seperti audiometer asesmen untuk tunarungu dan snellen chart asesmen untuk tunanetra.

Hal ini bertolak belakang dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjelaskan bahwa setiap sekolah yang ramah anak juga harus memiliki aksesibilitas yang tepat. Adanya aksesibilitas sangat penting bagi anak dikarenakan untuk menunjang kemudahannya

dalam beraktivitas di lingkungan sekolah. Aksesibilitas juga akan menunjang pemberian kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengakses lingkungan dengan aman, mandiri, dan mudah dalam setiap kegiatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kietaro (2017), menyatakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang cacat di Jepang sangat diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha, serta pelaku ekonomi. Diantara aksesibilitas yang difasilitasi yakni pada sekolah, universitas, mall, alat transportasi, toilet umum dan telepon umum. Berkaitan dengan perencanaan ukuran, standar, kualitas, dan desain aksesibilitas di Jepang sangat akses bagi para penyandang disabilitas semua usia. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat lebih inklusif dan sadar terhadap kesetaraan HAM.

Selama ini, kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas pada kota besar di Indonesia masih belum direalisasikan secara optimal dan hanya terbatas pada wacana. Berkaitan dengan hal tersebut, baik pemerintah maupun swasta harus pentingnya menyediakan sarana prasarana bagi para penyandang cacat fisik pada seluruh wilayah di Indonesia.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang keempat adalah fleksibilitas. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Fleksibilitas atau keluwesan adalah mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Barang

– barang di kelas mudah untuk ditata dan dipindahkan, (2) Penataan tempat duduk peserta didik juga mudah untuk diatur. SD Muhammadiyah

3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan fleksibilitas dengan cara penataan kelas yang bertujuan memudahkan pengaturan untuk setting pembelajaran individual, kelompok dan memudahkan pengaturan peserta didik berkebutuhan khusus. Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang kelima adalah kenyamanan. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Kenyamanan meliputi: pencahayaan, penghawaan/suhu udara, akustik, serta kepadatan kelas. Pencahayaan dapat mempengaruhi keadaan fisik, psikologis, dan keindahan ruang. Pencahayaan haruslah tepat melalui mekanisme penggunaan jendela dan

ventilasi. Pencahayaan kurang menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala. Sedangkan pencahayaan berlebihan juga akan mengganggu penglihatan.

SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan pengaturan kondisi fisik kelas dalam aspek kenyamanan dengan indikator pencahayaan dengan cara peserta didik berkebutuhan khusus tidak ditempatkan di daerah paparan cahaya berlebihan, Kelas tidak menggunakan lampu TL, Serta kelas mempergunakan tirai untuk pengaturan cahaya.

Penghawaan/Suhu Udara Suhu udara dapat mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Sirkulasi udara melalui jendela dan ventilasi penting untuk diatur dengan baik, sehingga peserta didik dapat berkonsentrasi dan terhindar dari ketidaknyamanan fisik. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator penghawaan guru melakukan pengaturan suhu udara dengan baik.

Akustik adalah terkait dengan lingkungan belajar yang tenang. Ruang kelas yang bising menyebabkan peserta didik mudah lelah dan sulit untuk berkonsentrasi. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator akustik Peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan jauh dari sumber bunyi berlebihan, serta guru mengontrol keramaian di kelas

Kepadatan Kelas Kepadatan kelas berkaitan dengan jumlah peserta didik dalam kelas. Jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas dapat membuat kelas menjadi padat. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator kepadatan menerapkan jumlah peserta didik tidak melebihi ukuran standar rumus hitung (luas total/jumlah peserta didik, tidak melebihi 2 m²).

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang keenam adalah keindahan. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Keindahan berkenaan dengan upaya yang dilakukan guru dalam menata kelas. Kelas yang ditata dengan indah dan menyenangkan berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku peserta didik. Peserta didik juga dapat belajar secara optimal dengan kondisi kelas yang indah. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan pengaturan kondisi

fisik kelas pada aspek keindahan dengan melakukan Pengaturan kelas tidak menimbulkan distraksi/pemecahan perhatian, serta Kelas tertata rapi dan tidak menimbulkan efek berlebihan.

PENUTUP

Simpulan

Aspek pengaturan peserta didik pada kedua sekolah sudah berjalan cukup baik. Dalam hal mengembangkan lingkungan yang memadahi untuk pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata guru kelas masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip, aturan, dan prosedur pembelajaran pada kelas inklusi. Meski demikian, pada aspek interaksi sosial pada siswa berkebutuhan khusus sudah dirasa baik dengan berkomunikasi serta berinteraksi secara verbal maupun non verbal dengan siswa berkebutuhan khusus. Pada aspek penanganan masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus, sebagian besar guru belum menerapkan secara tepat terkait intervensi minor. kBentu umpan balik yang diberikan yakni berupa pujian, motivasi, dan ucapan positif yang mendukung anak.

Secara umum kondisi fisik kelas di SD Muhammadiyah 3 ICP sudah memadai, meskipun dalam hal sarana prasarana masih banyak yang perlu ditingkatkan khususnya media untuk peserta didik berkebutuhan khusus, belum tersedianya ruang sumber, serta belum tersedianya ruang berstimulus tinggi dan rendah. Adapun berkaitan dengan aspek keindahan, SD Muhammadiyah 3 ICP sudah cukup indah dan nyaman dalam kepadatan, pencahayaan, akustik, dan penghawaan juga sudah cukup baik.

Faktor pendukung pengelolaan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kedua sekolah mencakup tiga aspek utama yaitu kondisi organisasional, lingkungan fisik, dan kondisi sosio- emosional, dan kondisi organisasional. Ketiga aspek tersebut dapat berjalan baik secara sinergis dan beriringan.

Faktor penghambat pengelolaan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kedua sekolah SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro mencakup keterbatasan pengetahuan guru yang tidak berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa sehingga guru kelas dan GPK harus belajar kembali tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan

husus, kurangnya media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, kurangnya keindahan ruang khusus, dan belum tepatnya prinsip penanganan perilaku, aturan, dan prosedur dalam pembelajaran.

Saran sesuai hasil penelitian disampaikan sebagai berikut :

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan faktor penghambat siswa berkebutuhan khusus di kedua sekolah SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak misalnya dengan badan pemerintahan, dinas pendidikan, lembaga swasta, orangtua, serta berbagai lembaga terkait.
2. Mengikutsertakan GPK dalam pelatihan tentang pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan atau mendatangkan ahli untuk memberikan pemahaman dan pelatihan keterampilan menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Membuat jadwal khusus layanan program pengembangan kekhususan bagi setiap peserta didik berkebutuhan khusus secara terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Akalin, S., & Sucuoglu, B. (2015). Effect of Classroom Management Intervention Based on Teacher Training and Performance Feedback on Outcomes of Teacher Student Dyads in Inclusive Classroom. *Journal of Educational Sciences: Theory & Practice*. 15(3). DOI: 10.12738/estp.2015.3.2543

Anjarsari & Dyah, A. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi*. 1(2). DOI: 10.26740/inklusi.v1n2.p91-104

Ashraf, A., Zhu, X., & Rauf, Q. (2010). Developing inclusive schools: The pivotal role of teaching assistants in promoting inclusion in special and mainstream schools in Northern Ireland. *International Conference on Education Technology Management*.

Doi.org/10.1145/3300942.3300946

Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Prenadamedia Group

Daryanto. (2013). *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: Yrma Widya.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Depdiknas. (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/ Inklusi, Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009*. Jakarta.

Depdiknas. (2006). *Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 2007*. Jakarta : Direktorat PSLB.

Fitriani. (2016). *Model Pengelolaan Kelas Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Gargiulo, Richard M. (2012). *Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. 4th Edition*. USA: Sage Publication.

Garnida, Dadang. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : Refika Aditama.

Glazzard, Jonathan. dkk. (2016). *Asih Asah Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Terjemahan Ony Suryaman*. Yogyakarta : PT Kansius.

Hermanto. 2010. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah. *Jurnal Pendidikan Khusus*. 6(2). DOI: https://doi.org/10.21831/jpk.v6i2.6737

Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Isabella, P., Emosda., & Suratno. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Teknologi Pendidikan* 4(2), 45-49.

Johnson, Louanne. (2008). *Pengajaran yang Kreatif dan Menarik: Cara Membangkitkan Minat Siswa melalui Pemikiran. Terjemahan oleh Dani Dharyani. 2009*. Jakarta: PT Indeks

- Karwati, Euis dan Priansa, Donni Juni. (2014). *Manajemen Kelas (Classroom Management)*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Mansor, et al. (2012). Effective Classroom Management. *International Education Studies Journal*. 5(5).
- Miles, Metthew B, A, et al. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition*. United States of America : Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muijs, Daniel dan David (2008). *Effective Teaching*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nurfitriani, Rahmah. (2016). *Model Pengelolaan Kelas Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Tesis). Diunduh dari <http://etheses.uinmalang.ac.id/11720/1/14760017.pdf>
- Peeters, Theo. (2009). *Panduan Autisme Terlengkap Hubungan Pengetahuan Teoritis Dan Intervensi Pendidikan Bagi Penyandang Autis. Terjemahan Oscar H. Simbolon & Yayasan Suryakanti*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Somantri, S. (2007). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Smith, J David. (2015). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua. Terjemahan Enrica Denis*. Bandung : Penerbit Nuansa
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji, (2014). Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 1-17.
- Suparno. (2001). *Buku Pegangan Kuliah Pendidikan Anak Tunarungu (Pendekatan Orthodidaktik)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Winarsih, Murni. (2007). *Intervensi Dini bagi Anak Tunarungu dalam Pemerolehan Bahasa*. Jakarta: Depdiknas
- PKLK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahardja, Djaja & Sujarwanto. (2010). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa (Orthopedagogik)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Santrock, John W. (2015). *Psikologi Pendidikan. Edisi Kedua. Terjemahan Tri Wibowo BS*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sartica, Dwi & Ismanto, Bambang. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 3(1), 49-66.